

**GERAK CEPAT MAHASISWA MBKM DALAM MENCIPTAKAN EDUKASI
KEMERGELAPAN PAJAK INDONESIA MELALUI RENJANI
DI KPP PRATAMA BANGKALAN**

Fainsanu Faraka¹, Emi Rahmawati²

^{1, 2} Universitas Trunojoyo Madura

Alamat e-mail : 220221100036@student.trunojo.ac.id¹,
emi.rahmawati@trunojoyo.ac.id²

ABSTRACT

Tax evasion Indonesia remains a significant challenge within Indonesia's taxation system, directly impacting the nation's revenue. Through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program, students are given the opportunity to contribute as tax volunteers in efforts to enhance taxpayer awareness and compliance. This article examines the active role of MBKM students during their four-month industrial internship at the Pratama Tax Office (KPP) in Bangkalan. Activities included assistance with Annual Tax Return (SPT) filing, taxpayer education, and both online and manual data entry and reporting. The results indicate that student involvement provides effective education, improves tax literacy, and strengthens the connection between tax authorities and the public. These findings underscore the importance of synergy among educational institutions, tax authorities, and society in establishing a transparent and efficient taxation system. The MBKM internship program has proven to not only provide practical experience for students but also contribute directly to combating tax evasion in Indonesia.

Keywords: MBKM, tax volunteers, tax evasion, tax education, annual tax return.

ABSTRAK

Kemergelapan pajak indonesia masih menjadi tantangan serius dalam sistem perpajakan Indonesia, yang berdampak langsung terhadap pendapatan negara. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkontribusi sebagai relawan pajak dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Artikel ini mengkaji peran aktif edukasi perpajakan untuk wajib pajak melalui mahasiswa MBKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan selama empat bulan. Kegiatan meliputi asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, edukasi kepada wajib pajak, serta penginputan dan pelaporan data secara daring dan manual. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa mampu memberikan edukasi efektif, meningkatkan literasi perpajakan, serta memperkuat hubungan antara otoritas pajak dan masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan, otoritas perpajakan, dan

masyarakat dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan berdaya guna. Program magang MBKM terbukti tidak hanya memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pemberantasan penggelapan pajak di Indonesia.

Kata Kunci: MBKM, relawan pajak, penggelapan pajak, edukasi perpajakan, SPT Tahunan.

A. Pendahuluan

Salah satu faktor terpenting yang memengaruhi pendapatan ekonomi suatu negara di Indonesia ialah perpajakan (Warno & Fahmi, 2020). Dengan adanya pajak dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam mendanai berbagai program serta aktivitas pembangunan (Akib et al., 2025). Dalam melakukan pendapatan pajak sering sekali muncul isu penggelapan pajak, penggelapan pajak tetap menjadi masalah yang kerap terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan peran mahasiswa MBKM sebagai relawan pajak yang ada di Indonesia. Posisi relawan pajak telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2021 (Lukman et al., 2023; PER-12/PJ/2021, 2021). Peran mahasiswa terkait program merdeka belajar kampus – kampus merdeka (MBKM) telah diatur dalam Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 (Kemendikbud nasional pendidikan tinggi standar, 2020). Melalui program MBKM, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perpajakan dan fungsi pajak dalam negeri.

Gagasan relawan pajak bukanlah hal yang baru. Di Amerika Serikat, mereka disebut sebagai Volunteer Income Tax Aid & Tax Counseling for the Elderly (VITA & TCE), yaitu sebutan bagi relawan untuk bantuan pajak penghasilan dan konseling pajak bagi para lansia. Sama halnya dengan VITA dan TCE di Amerika, tujuan relawan pajak di Indonesia adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak dan tanggung jawab perpajakannya, khususnya dalam hal pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik melalui e-filing (Hardika et al., 2022; Prihatini et al., 2024). Efektivitas relawan pajak dalam menurunkan angka penggelapan

pajak di Indonesia menjadi topik yang sering dibahas. Di satu sisi, sebagian pihak meyakini bahwa relawan pajak dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya mahasiswa (Habibah et al., 2024; Nurhidayah et al., 2021). Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai apakah relawan pajak benar-benar dapat memberikan pengaruh besar terhadap perilaku wajib pajak dan apakah mereka dapat memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa keterlibatan relawan pajak mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah penggelapan pajak yang meluas tanpa adanya dukungan sistem pemerintah yang kuat dan rendahnya tingkat pengetahuan (Tanjung & Chairina, 2025; Razif et al., 2023)

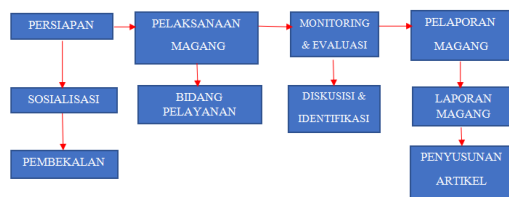
Dalam menangani permasalahan tersebut relawan pajak senantiasa memberikan asistensi kepada wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS dan S serta memberikan edukasi terkait peraturan perpajakan. Dalam konteks inilah, penting untuk memahami peran

relawan pajak Indonesia dalam menciptakan kemergelapan pajak di Indonesia. Dengan adanya relawan pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, relawan pajak juga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi kemergelapan pajak dan memberikan solusi yang tepat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat di kabupaten Bangkalan, khususnya alam hal pemahaman hak dan kewajiban perpajakn serta tata cara pengisian SPT Tahunan melalui E-filling. Selain itu kegiatan in juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasidan keaptuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa magang MBKM di KPP Pratama Bangkalan.

B. Metode Penelitian

Kegiatan magang industri ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bangkalan selama empat bulan, mulai tanggal 3 Februari sampai dengan 6 Juni 2025, dengan

durasi waktu delapan jam setiap harinya. Tahapan yang telah dilalui adalah persiapan pelaksanaan magang, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Adapun tahapan yang terlampir di bawah ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Tahapan Kegiatan
Magang Industri**

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Sosialisasi dan pembekalan merupakan bagian dari proses persiapan pelaksanaan magang. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa selama kurang lebih empat bulan dijelaskan pada tahap sosialisasi. Mahasiswa magang mendapatkan sosialisasi dalam bentuk tugas dan tahapan. Pihak wewenang MBKM dari kampus menangani langsung tahapan sosialisasi untuk memastikan semua berjalan dengan baik dan lancar. Setelah itu, pada tahap pembekalan, mahasiswa mendapatkan materi dan petunjuk tentang tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa magang. Setelah itu, mahasiswa mendapatkan

pendampingan tentang cara meningkatkan hard skill dan soft skill agar dapat berprestasi lebih baik selama magang industri..

Tahap kedua ialah diberikan pengarahan dan panduan tentang cara penginputan data dan perhitungan pajak perorangan SS dan S. Setelah semua memahami prosedur yang benar dan akurat, mahasiswa akan diminta untuk melengkapi SPT tahunan di situs DJP. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mahasiswa juga memberikan edukasi beserta testimoni kepada wajib pajak tentang pajak. Selain itu, mahasiswa juga akan menghitung dan memasukkan data secara manual untuk 1770 SS dan S. Mahasiswa diharuskan untuk mengunggah tanda terima elektronik (BPE) untuk setiap wajib pajak setelah menyelesaikan bantuan pengisian formulir pajak tahunan.

Untuk memastikan kegiatan kemahasiswaan berjalan lancar dan sesuai dengan jurusan, kompetensi dan bakat mahasiswa, maka pembimbing lapangan mendatangi lokasi magang untuk melakukan tahap ketiga, yaitu monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring mahasiswa selama dikantor untuk

memastikan tugas yang diberikan kepada mahasiswa berjalan dengan benar, dan sesuai dengan jurusan serta melakukan diskusi mengenai tantangan yang dihadapi selama kegiatan magang.

Tahap keempat adalah Laporan magang industri yang dibuat merupakan sebuah tanggung jawab mahasiswa terkait dengan aktivitas magang selama 4 bulan yang berupa tugas luaran yang wajib untuk dilakukan. Selain laporan magang adapun tugas luaran terkait dengan artikel, mahasiswa diberikan 2 pilihan untuk membuat artikel penelitian atau artikel pengabdian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan aktivitas magang dan pengabdian ini dilakukan dengan bantuan dan pengawasan langsung oleh pegawai yang bekerja di kantor KPP PRATAMA Kabupaten Bangkalan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan arahan dan bimbingan terkait dengan tugas yang diberikan selama magang untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Kegiatan pengabdian ini berlangsung pada bidang pelayanan kantor KPP PRATAMA kabupaten Bangkalan.

1. Penginputan Data di Laman DJP

Dalam tugas penginputan data ini mahasiswa memastikan bahwa semua data yang dimasukkan ke dalam sistem benar dan konsisten dengan dokumen yang diserahkan wajib pajak selama proses ini. Termasuk memasukkan informasi pribadi, pendapatan dari wajib pajak, dan pengurangan pajak yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Rata-rata sekitar 30-35 wajib pajak mengunjungi kantor pajak KPP Pratama Bangkalan dalam setengah harinya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya efisiensi entri data untuk menjamin layanan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi bagi semua wajib pajak. Untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dan memastikan kelancaran administrasi perpajakan, mahasiswa yang berpartisipasi dalam proses ini harus bekerja dengan tekun dan teliti. Proses ini juga melibatkan pemahaman tentang tarif pemotongan pajak yang berlaku, yang dapat bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan dan status perpajakan individu. Dalam UU HPP No. 7/2021 penghasilan yang

dikenakan pajak dimulai dari 0- 60 juta dikenakan tarif pajak 5 %, diatas 60 juta – 250 juta dikenakan tarif 15 %, diatas 250 juta – 500 juta dikenakan tarif 25 %, diatas 500 juta – 5 miliar dikenakan tarif 30%, diatas 5 miliar dikenakan tarif 35 %. Setelah penginputan data telah selesai wajib pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE)



Gambar 2. Penginputan Data di Laman DJP

2. Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Manual 1770 SS

Langkah pertama dalam proses ini adalah mengumpulkan dokumen yang diperlukan, termasuk slip gaji dan NPWP. Setelah itu, wajib pajak melengkapi Formulir 1770 SS, termasuk rincian mengenai identitas wajib pajak, pendapatan kotor, dan pengurangan. Wajib pajak harus menghitung dengan cermat total pendapatan dan pajak yang harus dibayar saat mengisinya di dampingi

oleh mahasiswa yang bertugas untuk mengcrossceck apakah sudah sesuai dan benar, dan mereka harus memastikan bahwa semua informasi yang mereka berikan benar dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang relevan. Wajib pajak harus menyerahkan SPT tersebut kepada kami setelah formulir diisi lengkap. Pelaporan manual ini diselesaikan dengan mengirimkan formulir kertas dan dokumentasi pendukung yang diperlukan kepada petugas pajak yang berwenang.



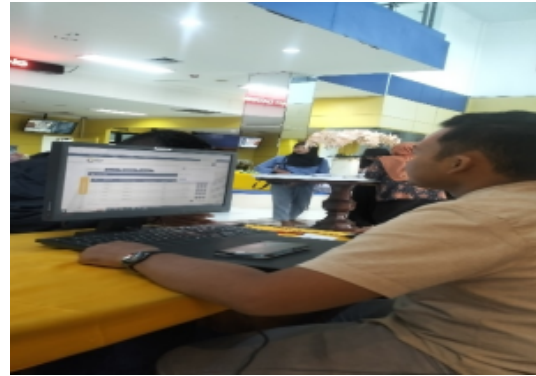
Gambar 3. Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Manual 1770 SS

3. Edukasi Terhadap Wajib Pajak Beserta Testimoni

Edukasi yang diberikan kepada wajib pajak mencakup berbagai topik,

seperti undang-undang pajak yang berlaku, metode pelaporan daring, memberitahukan kepada wajib pajak bahwa batas waktu pelaporan wajib pajak perorangan adalah 31 Maret, berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan tepat waktu dan pentingnya kepatuhan pajak. Serta menjelaskan bahwa selain diwajibkan oleh undang-undang, pelaporan SPT yang tepat juga membantu pembangunan negara dengan menghasilkan pendapatan pajak. Salah seorang wajib pajak, Bapak Nur Rahmad yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar, menyatakan, "Setelah menerima edukasi perpajakan dari mahasiswa, saya merasa lebih sadar akan kewajiban saya sebagai wajib pajak. Saya tidak hanya tahu cara melaporkan SPT, tetapi juga memahami betapa pentingnya kontribusi saya bagi pembangunan negara. Sekarang, saya tidak lagi merasa terbebani oleh pajak, tetapi bangga karena dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa." Testimoni ini menunjukkan bagaimana penyuluhan yang efektif dapat mengubah cara pandang wajib pajak dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab mereka. Selain

itu, wajib pajak diajarkan cara menggunakan aplikasi pelaporan pajak online, yang membuat proses pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien.

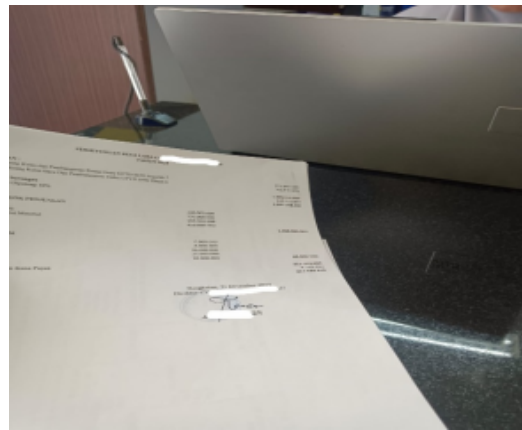


**Gambar 4. Edukasi Perpajakan
terhadap Wajib Pajak**

4. Pendampingan Pelaporan Asistensi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Pendampingan wajib pajak badan oleh mahasiswa sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat, baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi wajib pajak yang mereka bantu. Kegiatan ini biasanya dimulai pada bulan April, setelah mahasiswa menyelesaikan pendampingan untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Pendampingan ini adalah kesempatan emas bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang mereka pelajari di bangku kuliah ke dalam praktik nyata. Mahasiswa

berpartisipasi dalam proses pendampingan sebagai penginput data dan pengoreksi laporan keuangan. Mereka belajar cara membaca dan mengevaluasi neraca dan laporan laba rugi wajib pajak badan usaha. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pelaporan pajak tahunan dengan menggunakan E-Form di situs web DJP. Untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan benar dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang relevan. pendampingan wajib pajak badan oleh mahasiswa bukan hanya sekadar kegiatan akademis. Ini adalah kesempatan untuk belajar, berkontribusi, dan tumbuh sebagai individu yang lebih siap menghadapi tantangan di dunia profesional. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya membantu wajib pajak, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di masyarakat.

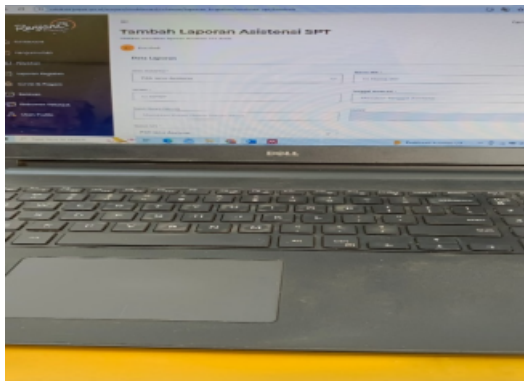


**Gambar 6. Pendampingan
Pelaporan Asistensi SPT Tahunan
Wajib Pajak Badan**

5. Mengunggah Tanda Terima Elektronik (BPE) di Laman Renjani

Salah satu langkah terpenting dalam tata cara pelaporan pajak bagi relawan pajak dan mahasiswa agang ialah mengunggah Bukti Penerimaan Elektronik (SPT) ke situs Renjani. Relawan pajak dan mahasiswa dapat mengunggah SPT sebagai bukti bahwa mereka telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat setelah menyelesaikan pelaporan SPT secara daring. Dalam kegiatan pengunggahan tanda terima elektronik (BPE) setiap harinya tergantung dari penerimaan pelaporan jumlah wp yang datang ke KPP Pratama Bangkalan, biasanya paling banyak yang kita unggah yaitu 35 (BPE) Direktorat Jenderal

Pajak membuat laman Renjani yang memungkinkan relawan pajak menyimpan dan mengambil bukti digital pelaporan mereka dengan mudah. Dalam menggunggah bukti penerimaan elektornik (BPE) yang dimasukkan ialah NPWP, nama wajib pajak, tanggal asistensi, durasi pelaporan, status pelaporan serta bukti penerimaan elektronik.



Gambar 6. Mengunggah Tanda Terima Elektronik (BPE) di Laman Renjani

D. Kesimpulan

Magang industri MBKM dilaksanakan selama empat bulan dimulai pada tanggal 3 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 6 Juni 2025. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bangkalan menjadi lokasi pelaksanaan program magang industri ini. Proses magang industri ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

penilaian, serta pelaporan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperlancar operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Kegiatan magang Industri menjadi lokasi pelaksanaan magang. Universitas Trunojoyo Madura, wajib pajak, mahasiswa, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bangkalan memperoleh banyak manfaat dari program magang industri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. R., Umar, W., & Marjani, M. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 126-138.
- Habibah, M., Maharany, I. D., Cahya, B. T., & Fitria, Z. (2024). Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati.
- Hardika, N. S., Askara, I. K. J., & Wijana, I. M. (2022). The effect of taxpayer understanding and use of e-filing on taxpayer compliance with tax volunteer as moderating variable. *Jurnal*

- Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 95-110.
- Kemendikbud Nasional Pendidikan Tinggi Standar. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 47.
- Lukman, H., Kezia, C., Woen, E. D., & Lie, I. K. (2023). Pendampingan Wajib Pajak Orang Pribadi Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan E-Filing. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023, Hal. 400-408.
- Nurhidayah, F., Dwianika, A., Sofia, I. P., Wisnantiasri, S. N., Fitria, A., Syahrial, A., & Rahmawati, E. (2021). Pelayanan Wajib Pajak Oleh Relawan Pajak Di Tax Center. *Prosiding Sembadha*, 2, 369-371.
- PER-12/PJ/2021, P. D. J. P. N. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/Pj/2021. 6.
- Prihatini, M., Kusumawati, N., & Amyati, A. (2024, October). Sistem e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderating. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 4, No. 1, pp. 139-154).
- Razif, R., Iswadi, I., Yulisda, D., Alfarizi, R., & Nita, E. (2023). Workshop Pendampingan Pelaporan Pajak bagi Relawan Pajak sebagai Efektivitas Pelayanan Publik. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 3(3), 145-149.
- Tanjung, J., & Chairina, S. W. (2025). Determinan Kinerja Pelayanan Relawan Pajak. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 167-180.
- Warno, W., & Fahmi, U. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq45. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2), 188-201.